

**DAMPAK KEPADATAN PENDUDUK DI PULAU JAWA TERHADAP
KESEJAHTERAAN DAN KRIMINALITAS**

Julia Armita Parenja, Miftah Az-zura Salsabila, Fatmawati

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Jl. Soebrantas No. 155 Pekanbaru 28293

juliaarmitaparenja@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Dampak kepadatan penduduk di Pulau Jawa terhadap kesejahteraan masyarakat dan tingkat kriminalitas. Metode penelitian ini menggunakan , teknik studi pustaka dengan mencari sumber atau literatur dalam bentuk data primer berupa jurnal nasional maupun internasional 10 tahun terakhir (2015-2025). Selain itu, dalam pembuatan review ini juga dilakukan pencarian data dengan menggunakan media online, seperti: Google Scholar. Seiring dengan meningkatnya populasi, berbagai permasalahan sosial muncul, seperti pengangguran, ketimpangan ekonomi, serta keterbatasan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan. Jika kepadatan penduduk yang tidak terkendali maka dapat menyebabkan kontribusi terhadap peningkatan angka kriminalitas yang mengakibatkan persaingan yang ketat dalam memperoleh sumber daya dan pekerjaan dan mendorong peningkatan angka kriminalitas. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih efektif dalam pengelolaan kependudukan, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kesempatan kerja untuk mengurangi dampak negatif dari kepadatan penduduk di Pulau Jawa.

Kata Kunci : Penduduk, Kesejahteraan, Kriminalitas

Abstract

The purpose of this study is the impact of population density on Java Island on community welfare and crime rates. This research method uses a library study technique by searching for sources or literature in the form of primary data in the form of national and international journals for the last 10 years (2015-2025). In addition, in making this review, data searches were also carried out using online media, such as: Google Scholar. Along with the increasing population, various social problems arise, such as poverty, economic inequality, and limited access to education and health services. If population density is uncontrolled, it can contribute to an increase in crime rates which results in tight competition in obtaining resources and jobs and encourages an increase in crime rates. Therefore, more effective policies are needed in population management, equitable development, and increasing employment opportunities to reduce the negative impacts of population density on Java Island.

Keywords : Density, Welfare, Crime,

PENDAHULUAN

Pulau Jawa merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Tingginya angka kelahiran serta migrasi ke Pulau Jawa menyebabkan kepadatan penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kepadatan ini membawa berbagai dampak sosial dan ekonomi, termasuk kesejahteraan masyarakat dan tingkat kriminalitas.

Menurut penelitian Charis Christiani, Pratiwi Tedjo, dan Bambang Martono (2014), kepadatan penduduk yang tinggi di Jawa Tengah menyebabkan berbagai tantangan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tingginya populasi berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pendapatan masyarakat. Meskipun pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan, seperti program pendidikan gratis, bantuan kesehatan, dan peningkatan akses ekonomi bagi masyarakat miskin, masalah kesejahteraan masih menjadi tantangan besar.

Selain berdampak pada kesejahteraan, kepadatan penduduk juga berkontribusi terhadap meningkatnya kriminalitas. Rafli Muhammad Sabiq dan Nunung Nurwati (2020) dalam jurnalnya mengungkapkan bahwa kepadatan penduduk berkorelasi positif dengan angka kriminalitas. Keterbatasan sumber daya, lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan jumlah tenaga kerja, serta ketimpangan sosial, menyebabkan banyak individu terdorong melakukan tindakan kriminal. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa daerah dengan tingkat kepadatan tinggi cenderung memiliki tingkat kriminalitas lebih tinggi dibandingkan daerah dengan populasi yang lebih terkendali.

Dampak kepadatan penduduk tidak hanya mempengaruhi tingkat kesejahteraan dan kriminalitas secara langsung, tetapi juga memberikan tekanan terhadap lingkungan dan tata ruang wilayah. Penelitian dalam jurnal Arif, A. F. N., & Nurwati, N. (2019). menjelaskan bahwa kepadatan penduduk yang tidak terkontrol menyebabkan berbagai masalah seperti kemiskinan, minimnya akses terhadap fasilitas umum, dan meningkatnya tingkat pengangguran. Strategi yang diterapkan pemerintah, seperti program transmigrasi dan kebijakan keluarga berencana, belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi permasalahan ini.

Menurut Arif, A. F. N., & Nurwati, N. (2019). Kepadatan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan, meningkatnya angka pengangguran, serta ketimpangan dalam distribusi fasilitas sosial. Urbanisasi yang tidak terkendali juga memicu munculnya kawasan kumuh, meningkatnya tekanan terhadap infrastruktur perkotaan, serta terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Kebijakan seperti program transmigrasi dan

pengendalian pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) telah diterapkan oleh pemerintah, tetapi hasilnya belum optimal dalam mengatasi permasalahan kepadatan penduduk.

Penelitian oleh Muawanah (2020) mengungkapkan bahwa kepadatan penduduk memiliki pengaruh negatif terhadap kualitas hidup masyarakat di Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada aspek pendidikan, kesehatan, dan penghasilan, yang merupakan komponen utama dalam kesejahteraan. Muawanah menyimpulkan bahwa “peningkatan jumlah penduduk tidak diiringi dengan peningkatan fasilitas sosial dasar” sehingga menyebabkan ketimpangan antarwilayah di dalam provinsi (Muawanah, 2020, hlm. 8).

Lebih jauh lagi, tingginya kepadatan penduduk juga berkorelasi dengan meningkatnya angka kriminalitas. Penelitian oleh Yulia dan Widyaningsih (2019) menunjukkan bahwa di Jawa Timur, kemiskinan, pengangguran, dan kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingginya angka kriminalitas (Yulia & Widyaningsih, 2019, hlm. 176). Hal serupa disampaikan oleh Desinta (2022), yang menyatakan bahwa jumlah penduduk secara signifikan memengaruhi kejadian kejahatan di Jawa Barat, karena peningkatan jumlah penduduk diiringi dengan meningkatnya potensi konflik dan penyimpangan sosial (Desinta, 2022, hlm. 21).

Dalam skala nasional, Pratama dan Ariusni (2019) menemukan bahwa kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. Mereka menegaskan bahwa “semakin meningkat kepadatan penduduk maka kriminalitas akan semakin meningkat” (Pratama & Ariusni, 2019, hlm. 5). Selain itu, mereka juga menyebut bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif terhadap kriminalitas, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia yang baik cenderung menekan potensi kejahatan.

Data dari Nisa et al. (2024) memperkuat argumen tersebut. Mereka menyajikan bahwa Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang merupakan tiga provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, juga mencatat jumlah kasus kriminalitas tertinggi di Indonesia pada tahun 2022. Misalnya, Jawa Timur mencatat 51.905 kasus kejahatan, menjadikannya provinsi dengan angka kriminalitas tertinggi secara nasional (Nisa et al., 2024, hlm. 5).

METODE

Dalam langkah menyusun artikel ini, teknik yang digunakan yaitu teknik studi pustaka dengan mencari sumber atau literatur dalam bentuk data primer berupa jurnal nasional

maupun internasional 10 tahun terakhir (2015-2025). Selain itu, dalam pembuatan review ini juga dilakukan pencarian data dengan menggunakan media online, seperti: Google Scholar.

PEMBAHASAN

Kepadatan Penduduk di Pulau Jawa

Pulau Jawa merupakan pulau dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Charis Christiani, Pratiwi Tedjo, dan Bambang Martono,(2014) kepadatan penduduk di Jawa Tengah tercatat mencapai 995 jiwa/km² dengan laju pertumbuhan penduduk 0,37% per tahun. Kepadatan ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah tetapi juga di seluruh Pulau Jawa, yang menyebabkan tekanan besar terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Menurut Arif, A. F. N., & Nurwati, N. (2019). Jumlah penduduk yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan pemerataan pembangunan menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kesenjangan ekonomi, minimnya akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatnya tingkat pengangguran. Pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya dan lapangan pekerjaan juga mendorong munculnya berbagai permasalahan sosial, termasuk kriminalitas.

Rafli Muhammad Sabiq dan Nunung Nurwati(2020) menyebutkan bahwa perlu adanya kebijakan yang lebih komprehensif dalam mengelola urbanisasi dan distribusi penduduk di Pulau Jawa. Tanpa kebijakan yang tepat, kepadatan penduduk akan terus menjadi permasalahan yang berdampak luas pada kesejahteraan masyarakat dan stabilitas sosial.

Kepadatan penduduk di Pulau Jawa menjadi salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan nasional, khususnya dalam konteks peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kriminalitas. Berdasarkan artikel Muawanah (2020), tingginya jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah berdampak signifikan terhadap menurunnya kualitas hidup masyarakat. Faktor-faktor seperti akses pendidikan, pelayanan kesehatan, dan pendapatan rumah tangga menunjukkan hasil negatif ketika dihadapkan pada kondisi kepadatan tinggi. Muawanah menyimpulkan bahwa "semakin tinggi kepadatan penduduk, maka kualitas hidup masyarakat semakin menurun" (Muawanah, 2020, hlm. 7).

Kajian Teori untuk memperkuat penelitian dari Muawanah adalah:

1. Teori Kesejahteraan Sosial: Teori ini berfokus pada upaya meningkatkan kualitas hidup individu dalam masyarakat, termasuk dalam hal akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan

pendapatan yang layak. Muawanah (2020) menunjukkan bahwa jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas sosial yang memadai, maka kualitas hidup masyarakat akan menurun. Hal ini berkaitan dengan ketidakmerataan distribusi fasilitas sosial yang dapat menyebabkan penurunan dalam kualitas pendidikan dan kesehatan.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi dan Kepadatan Penduduk: Dalam konteks teori ini, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti sumber daya alam, modal manusia (termasuk pendidikan dan kesehatan), dan modal fisik. Ketika jumlah penduduk meningkat pesat tanpa diikuti oleh peningkatan sarana sosial, seperti pendidikan dan fasilitas kesehatan, maka kualitas pendidikan dan kesehatan akan menurun, yang pada gilirannya akan mempengaruhi produktivitas dan pendapatan masyarakat. Ini menciptakan siklus negatif yang dapat memperburuk kesejahteraan masyarakat.

Kondisi tersebut diperparah oleh tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran di kawasan padat seperti Pulau Jawa. Dalam studi yang dilakukan oleh Nisa et al. (2024), Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat—tiga wilayah terpadat di Indonesia—menjadi provinsi dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, sekaligus mencatat angka kriminalitas tertinggi secara nasional. Penelitian ini menyebutkan bahwa "tingkat kriminalitas tertinggi pada tahun 2022 terjadi di Jawa Timur dengan total 51.905 kasus" (Nisa et al., 2024, hlm. 5), diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Kajian Teori untuk memperkuat penelitian dari Nisa et al., 2024 adalah:

1. Teori Strain (Strain Theory) – Robert K. Merton

Teori ini menyatakan bahwa kriminalitas terjadi ketika ada ketidaksesuaian antara tujuan budaya yang diakui (seperti kekayaan atau kesuksesan) dan sarana yang tersedia secara legal untuk mencapainya. Di daerah padat dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi, masyarakat menghadapi hambatan struktural untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, sehingga sebagian orang memilih jalan pintas melalui tindakan kriminal. Penjelasan ini sangat relevan dengan tingginya kriminalitas di provinsi-provinsi seperti Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah.

2. Teori Disorganisasi Sosial (Social Disorganization Theory) – Shaw dan McKay

Teori ini menekankan bahwa lingkungan sosial yang miskin, padat, dan tidak stabil cenderung melemahkan institusi sosial seperti keluarga, sekolah, dan komunitas, yang biasanya menjadi pengendali sosial. Ketika pengawasan sosial melemah, peluang dan kecenderungan untuk melakukan kejahatan meningkat. Dalam konteks provinsi padat di Pulau Jawa, kepadatan

penduduk yang tinggi dan kemiskinan dapat menciptakan kondisi disorganisasi sosial yang memicu meningkatnya angka kriminalitas.

Dampak Kepadatan Penduduk terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Kepadatan penduduk yang tinggi di Pulau Jawa memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Salah satu dampak utama adalah terbatasnya akses terhadap pendidikan. Menurut penelitian Charis Christiani, Pratiwi Tedjo, dan Bambang Martono(2014), meskipun pemerintah telah mengimplementasikan kebijakan seperti program wajib belajar 9 tahun dan pemberian beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu, namun kepadatan penduduk yang tinggi membuat pemerataan pendidikan menjadi sulit.

Selain pendidikan, aspek kesehatan juga terkena dampak dari kepadatan penduduk. Menurut Arif, A. F. N., & Nurwati, N. (2019), melaporkan bahwa meskipun pemerintah telah meningkatkan layanan kesehatan melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), serta peningkatan akses air bersih dan sanitasi, kepadatan penduduk yang tinggi tetap menyebabkan kesulitan dalam memberikan layanan kesehatan yang merata. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kesakitan di daerah padat penduduk, terutama di kawasan perkotaan dengan kondisi lingkungan yang kurang sehat.

Lapangan pekerjaan juga menjadi masalah utama akibat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Rafli Muhammad Sabiq dan Nunung Nurwati(2020) menemukan bahwa jumlah tenaga kerja yang meningkat tidak sebanding dengan ketersediaan pekerjaan. Hal ini menyebabkan tingginya angka pengangguran, yang berdampak pada meningkatnya jumlah masyarakat miskin. Banyak pekerja yang akhirnya terpaksa bekerja di sektor informal dengan pendapatan yang rendah dan tidak stabil.

Kepadatan Penduduk dan Peningkatan Kriminalitas

Selain berdampak pada kesejahteraan, kepadatan penduduk di Pulau Jawa juga berkontribusi terhadap meningkatnya angka kriminalitas. Rafli Muhammad Sabiq dan Nunung Nurwati menemukan bahwa kepadatan penduduk memiliki korelasi positif dengan peningkatan tindakan kriminal. Faktor utama yang menyebabkan hal ini adalah keterbatasan sumber daya dan pekerjaan, yang mendorong individu untuk melakukan tindakan ilegal demi bertahan hidup.

Sementara itu, penelitian Yulia dan Widyaningsih (2019) secara khusus menganalisis hubungan antara variabel ekonomi dan tingkat kriminalitas di Jawa Timur. Hasil analisis

regresi menunjukkan bahwa variabel kepadatan penduduk, tingkat kemiskinan, dan pengangguran berpengaruh positif terhadap angka kejahatan. Mereka menyatakan bahwa "tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Jawa Timur menjadi penyumbang utama meningkatnya kriminalitas" (Yulia & Widyaningsih, 2019, hlm. 176). Hal ini memperkuat asumsi bahwa kondisi ekonomi yang buruk pada daerah padat memicu munculnya tindakan kriminal sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan hidup.

Kajian Teori untuk memperkuat penelitian dari Yulia dan Widyaningsih (2019) adalah:

1. Teori Ekonomi Kejahatan (Economic Theory of Crime) – Gary Becker

Gary Becker menyatakan bahwa individu akan melakukan kejahatan jika manfaat yang diperoleh dari kejahatan melebihi biaya atau risiko yang ditanggung. Dalam konteks kemiskinan dan pengangguran, individu menghadapi keterbatasan sumber daya ekonomi, sehingga kejahatan dipandang sebagai pilihan rasional untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ini mendukung temuan Yulia dan Widyaningsih bahwa kondisi ekonomi buruk mendorong kriminalitas.

2. Teori Pilihan Rasional (Rational Choice Theory)

Sejalan dengan Becker, teori ini menganggap bahwa individu membuat keputusan atas dasar perhitungan untung-rugi. Dalam masyarakat yang dilanda kemiskinan dan pengangguran, kejahatan bisa tampak sebagai "solusi" logis terhadap tekanan ekonomi. Kepadatan penduduk memperburuk situasi ini karena meningkatkan persaingan atas sumber daya yang terbatas.

Hasil serupa juga ditunjukkan dalam studi Desinta (2022) yang meneliti kasus kriminalitas di Provinsi Jawa Barat. Menggunakan pendekatan regresi data panel, Desinta menemukan bahwa "jumlah penduduk, persentase penduduk miskin, dan PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap angka kriminalitas" (Desinta, 2022, hlm. 26). Ia juga mencatat bahwa peningkatan jumlah penduduk sebesar 1% dapat menyebabkan peningkatan kasus kejahatan sebanyak 3.889 kasus, menandakan adanya hubungan erat antara kepadatan dan kerentanan sosial.

Kajian Teori untuk memperkuat penelitian dari Desinta (2022) adalah:

1. Teori Transisi Demografis dan Kerentanan Sosial

Teori ini menjelaskan bahwa dalam tahap transisi demografis, ketika pertumbuhan penduduk berlangsung cepat tanpa diimbangi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, akan muncul ketimpangan sosial yang menciptakan kerentanan terhadap berbagai masalah sosial, termasuk kriminalitas. Penemuan Desinta tentang dampak signifikan penambahan jumlah penduduk

terhadap peningkatan kasus kejahatan sejalan dengan kerangka ini.

2. Teori Ekonomi Kejahatan – Gary Becker

Teori ini mengemukakan bahwa keputusan untuk melakukan kejahatan didasarkan pada analisis rasional terhadap biaya dan manfaat. Dalam konteks penelitian Desinta, ketika PDRB per kapita rendah dan kemiskinan tinggi, manfaat ekonomi dari tindakan kriminal dapat dianggap lebih besar dibandingkan risikonya, sehingga angka kriminalitas meningkat.

Dari perspektif yang lebih luas, Pratama dan Ariusni (2019) menegaskan bahwa kepadatan penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kriminalitas secara nasional. Dalam analisis panel terhadap 31 provinsi, mereka menyebutkan bahwa "kepadatan penduduk berpengaruh signifikan terhadap kriminalitas dengan nilai t-statistik sebesar -4,372739" (Pratama & Ariusni, 2019, hlm. 7). Meskipun pengaruhnya negatif dalam model tersebut, hal ini dijelaskan oleh variasi karakteristik kepadatan di masing-masing provinsi, termasuk faktor kunjungan temporer dan distribusi fasilitas publik. Namun demikian, mereka tetap menekankan pentingnya peningkatan IPM sebagai solusi jangka panjang, karena "IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kriminalitas, yang berarti semakin tinggi kualitas SDM, semakin rendah tingkat kejahatan" (hlm. 6).

Kajian Teori untuk memperkuat penelitian dari Pratama dan Ariusni (2019) adalah:

1. Teori Sumber Daya Manusia (Human Capital Theory) – Gary Becker

Teori ini menyatakan bahwa investasi pada pendidikan, kesehatan, dan pelatihan akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan mengurangi kecenderungan terhadap perilaku menyimpang seperti kriminalitas. Temuan bahwa IPM berpengaruh negatif terhadap kriminalitas sejalan dengan pandangan ini: semakin tinggi kualitas SDM, semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan semakin kecil insentif untuk melakukan kejahatan.

2. Teori Ketimpangan Sosial dan Kejahatan Richard Wilkinson

Wilkinson menyatakan bahwa ketimpangan sosial baik dalam akses pendidikan, layanan kesehatan, maupun pendapatan memicu stres sosial dan gangguan psikologis yang dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Dalam konteks penelitian ini, provinsi dengan kepadatan tinggi namun tanpa pemerataan fasilitas publik dapat mengalami tekanan sosial yang lebih besar, yang kemudian berkontribusi terhadap kriminalitas.

KESIMPULAN

Kepadatan penduduk di Pulau Jawa memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat dan tingkat kriminalitas. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan urbanisasi yang tidak terkendali. Dampaknya terasa dalam berbagai aspek kehidupan, terutama kesejahteraan masyarakat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi sumber daya, termasuk pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Meskipun pemerintah telah menerapkan program wajib belajar dan jaminan kesehatan, keterbatasan fasilitas serta sumber daya membuat kesejahteraan masyarakat belum merata. Selain itu, kepadatan penduduk juga berkontribusi terhadap peningkatan angka kriminalitas. Persaingan yang ketat dalam memperoleh pekerjaan dan tekanan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat memilih jalan pintas melalui tindakan kriminal.

keterbatasan ekonomi dan ketimpangan sosial akibat kepadatan penduduk berkontribusi pada meningkatnya tindakan kriminal. Kebijakan seperti program KB dan transmigrasi telah diterapkan untuk mengatasi permasalahan ini, namun masih perlu penguatan dalam implementasi dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, strategi yang lebih efektif dalam pengelolaan penduduk, pemerataan ekonomi, dan penguatan sosial sangat diperlukan untuk menekan dampak negatif dari kepadatan penduduk di Pulau Jawa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, A. F. N., & Nurwati, N. (2019). Pengaruh konsentrasi penduduk Indonesia di Pulau Jawa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial*, 4(1), 45–58.
- Christiani, C., Tedjo, P., & Martono, B. (2014). Analisis dampak kepadatan penduduk terhadap kualitas hidup masyarakat Provinsi Jawa Tengah. *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, 3(2), 102–114.
- Desinta, D. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian kejahatan di Provinsi Jawa Barat tahun 2018–2020. *Median: Jurnal Ilmiah Populer*, 5(1), 20–29.
- Muawanah, S. (2020). Analisis dampak kepadatan penduduk terhadap kualitas hidup masyarakat Provinsi Jawa Tengah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(3), 1–9.
- Nisa, W. K., Agustin, R. S., & Syofyan, A. (2024). Pengaruh tingkat kemiskinan terhadap tingkat tindak kriminalitas di Indonesia tahun 2022. *Jurnal Kajian Ilmu Ekonomi dan Bisnis*, 5(1), 1–10.
- Pratama, R. P. A., & Ariusni. (2019). Pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap tingkat kriminalitas di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 1(1), 1–10.
- Sabiq, R. M., & Nurwati, N. (2020). Pengaruh kepadatan penduduk terhadap tindakan kriminal.

Kolaborasi Resolusi Konflik, 3(2), 161–167

Yulia, E. Y. P., & Widyaningsih, E. W. (2019). Analisis faktor ekonomi yang memengaruhi kriminalitas di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi dan Kuantitatif (JEQu)*, 9(1), 168–177.